

**Notulensi Seminar Nasional Kakao Berkelanjutan  
(Pertanian Berkelanjutan di Bentang Lahan Tropis Asia – the Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes/SFITAL)**

*Makassar, Rabu, 19 Oktober 2022*

*Pukul 08.30 – 13.20 WITA*

(Hotel Four Points Makassar, Ruang Persik Lt 1)

( Zoom platform : <https://agroforestri.id/semnaskakao> )

### **Peserta**

Seminar Nasional Kakao Berkelanjutan dilakukan secara hybrid (daring dan luring) dengan peserta luring sebanyak 105 orang dan peserta daring sebanyak 16 orang dari berbagai unsur terkait program kakao berkelanjutan sesuai daftar undangan.

### **Pembukaan**

- MC menyambut peserta dan menjelaskan maksud dan tujuan seminar nasional.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- Pembacaan Doa

### **SAMBUTAN**

#### **Dr. Sonya Dewi, Direktur CIFOR-ICRAF Indonesia**

- Menjelaskan tentang ICRAF sebagai institusi penelitian global yang bergerak dibidang agro forestry. Sekarang ini agro forestry sudah dianggap makin penting untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan penghidupan ke petani sekaligus memperbaiki dan memelihara jasa lingkungan yang dibutuhkan semua orang. ICRAF memiliki misi untuk menghasilkan pengetahuan yang bisa melihat keberagaman manfaat pepohonan di dalam hutan dan di luar hutan serta mengimplementasikannya bersama petani dan dapat memberikan manfaat maksimum kepada petani. Kakao merupakan komoditi agro forestry dan merupakan potensi yang besar untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan kakao berkelanjutan.
- Saat ini banyak *offtakers* menggaungkan deforestation free, bahkan forest positive cukup keras gaungnya di global. Pembelajaran ini merupakan asset penting bahwa semua bisa berkontribusi untuk pengelolaan kakao berkelanjutan di Indonesia pada khususnya. Oleh karenanya, ICRAF bersama Rainforest Alliance dan MARS, didukung oleh Technical Advisor Committee yang diketuai pak Anang, mengimplementasikan SFITAL (the Sustainable Farming in Tropical Asian Landscape) yang didanai oleh IFAD. Tujuan SFITAL adalah terwujudnya perubahan positif dalam pengelolaan produksi dan sistem pertanian kakao serta peningkatan resiliensi usaha petani. Yang tak kalah penting adalah pemeliharaan dan perbaikan jasa lingkungan di bentang lahan yang menghasilkan kakao. Di Sulsel, SFITAL berfokus pada kakao berkelanjutan dan sudah memasuki 2 tahun diterapkan di Kab. Luwu Utara (sejak 2020). Pada tanggal 16 Februari 2021 ditandatangani MoU dengan Pemda Luwu Utara hingga 2025.
- Pendekatan SFITAL agak berbeda dari pendekatan lain karena dilakukan dengan melalui pendekatan sistem menyeluruh, integrative diskala kebun bentang lahan dan juga yurisdiksi. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan antaranya berupa

pelatihan-pelatihan pada tingkat kebun, dan ada pelatihan untuk lembaga usaha sehingga bisa menjadi bagian dari *theory of change* terkait capaian yang ingin dituju bersama.

- SFITAL telah didesain dan disiapkan 6 kebun belajar dan disertai penyusunan dokumen kurikulum pelatihan agro forestri kakao oleh para pihak dan akan diujicobakan bersama petani Luwu Utara dan petani binaan Balai Besar.
- ICRAF berharap seminar nasional ini menjadi ajang belajar, berbagi dan diskusi antar semua sehingga pada akhir acara dapat membawa pulang sesuatu yang dapat mendukung kakao berkelanjutan.

#### **Suharman Sumpala, Ketua Dewan Anggota CSP**

- 4 bulan yang lalu, CSP melakukan Rapat Umum di Sulawesi Tengah dan kali ini di Makassar, ini adalah momentum dimana CSP akan membahas beberapa hal strategis kedepan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, inspirasi dan tentunya untuk keberlanjutan kakao. Seminar ini dapat digunakan untuk saling berbagi dan belajar dari berbagai pelaku kakao untuk diterapkan membantu keberlanjutan kakao.
- Agar kakao tetap lestari dan berkelanjutan tentunya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, NGO, sektor swasta agar petani kakao dapat merasakan manfaat serta peningkatan ekonomi dan kakao juga dapat kembali menjadi primadona.
- Tantangan terbesar kita adalah produk dan produktivitas yang menurun. Semoga pertemuan ini bisa mendorong untuk saling bahu membahu demi keberlanjutan kakao.

#### **Pemaparan Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara**

#### **Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara**

- Kakao merupakan salah satu komoditas prioritas nasional, salah satu produsen terbesar adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Luwu Utara menempati urutan pertama produksi kakao di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai sentra produksi kakao, banyak potensi yang dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan saat ini dan ke depan dalam mengelola kakao lestari. Peta jalan kakao lestari ini membuka jalan bagi pemerintah kabupaten dengan komoditas unggulan untuk mengelola komoditas secara lestari.
- Subsektor perkebunan menopang ekonomi wilayah dengan kontribusi terhadap PDRB yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah pengurangan lahan produksi kakao. Seluruh kebun kakao di Luwu Utara adalah kebun rakyat sehingga berbicara mengenai kakao berarti juga berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.
- Penyumbang PDRB terbesar masih bersumber dari sektor berbasis lahan yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan pekerjaan utama masyarakat juga pada sektor berbasis lahan. Sektor pertanian termasuk di dalamnya perkebunan berkontribusi sebesar 53,81%, meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
- Dokumen peta jalan dapat menjadi alat komunikasi untuk mengartikulasikan pemikiran strategis dan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan kepentingan para pihak.

- Luwu Utara sebagai kabupaten terluas di Sulsel merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di Sulsel. Luwu Utara melakukan redistribusi lahan dimana salah satunya diperuntukkan untuk lahan perkebunan kakao. Ada 5.000 bidang lahan dimana sidang pertama memutuskan 800 bidang lahan dan sidang kedua 4.200 bidang lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang sudah melakukan penguasaan/pengelolaan tetapi belum memiliki legalitas.
- Pemerintah kab. Luwu Utara sangat peduli terhadap sektor kakao ini yang mana salah satunya adalah dengan terlibat dalam Peta Jalan Kakao Lestari. PDRB Luwu Utara ditopang dari sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 49,04% pada tahun 2021 dimana hampir setengahnya didapatkan dari subsektor perkebunan, salah satunya kakao. Alih fungsi lahan dan kejadian banjir berulang adalah beberapa faktor yang menyebabkan pengurangan lahan kakao dari 56.000 hektar (2009) menjadi 38.367,04 hektar. Kebun kakao di Luwu Utara sebagian besar merupakan kebun rakyat yang dikelola langsung oleh petani dimana permasalahan dari pengelolaan skala kecil ini (smallholder) antara lain serangan hama penyakit sehingga perlu diversifikasi klon dan perbaikan kesuburan tanah.
- Terdapat kecamatan-kecamatan dengan mayoritas produksi kakao. Kecamatan Sabbang yang paling luas memiliki kebun kakao disusul Kecamatan Sabbang Selatan dan Kecamatan Malangke. Luwu Utara terkenal dengan klon unggul kakao Masamba, dengan ukuran buah yang besar. Bencana banjir pada tahun 2020 merupakan pukulan bagi aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Tiga desa utama terdampak dan melumpuhkan ekonomi masyarakat, termasuk sekitar 1,888 ha lahan kakao yang terdampak.
- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao melalui praktik pengelolaan yang berkelanjutan dengan tagline “Kakao Lestari, Rakyat Sejahtera.” Inisiatif peningkatan keberlanjutan pengelolaan kakao sudah mulai dibangun sejak tahun 2013. Dan peta jalan kakao lestari bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan kakao berkelanjutan sebagai respon atas berbagai permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan dan pengembangan kakao.
- Kakao, kelapa sawit dan sawah adalah 3 komoditas dengan luas terbesar dibandingkan dengan komoditi lain seperti kopi, tanaman semusim dan kebun campuran. Meski LQ kelapa sawit menunjukkan nilai paling besar, namun laju pertumbuhan produksi kakao menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan kelapa sawit.
- Pendekatan lanskap dalam penyusunan peta jalan untuk mengurai interaksi antara manusia, pertanian, kehutanan, perikanan, sistem penghidupan non-pertanian, keanekaragaman hayati, infrastruktur untuk menciptakan skema pengelolaan penggunaan lahan untuk mencapai tujuan pembangunan. Ada 3 prinsip penyusunan peta jalan yaitu pertama Inklusif (melibatkan para pemangku kepentingan dalam diskusi dan kolaborasi. Proses diskusi melibatkan masyarakat, swasta, akademisi, media dan pemerintah daerah). Kedua, Integratif (memadukan rencana pembangunan dan penataan ruang serta kebijakan sector lainnya untuk menghindari *silo*). Ketiga, Informed (berbasis data dan proyeksi dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan serta pemodelan scenario dan analisis dampak pembangunan).
- Alur kerja penyusunan peta jalan sudah melalui berbagai tahapan diskusi secara partisipatif dengan para pihak di Kabupaten Luwu Utara. Isu strategis diidentifikasi untuk merumuskan rencana tindak lanjut dalam pengelolaan kakao lestari. Para

pihak kemudian merumuskan visi bersama dengan mempertimbangkan kondisi pengelolaan kakao. Ada 3 isu dan tantangan dalam pengelolaan kakao di Luwu Utara yaitu terkait **Lahan** (penurunan luas lahan kakao, penurunan daya dukung lahan, perlunya peremajaan kebun), **SDM dan Produktivitas** (keterbatasan saprodi yaitu bibit unggul dan pupuk subsidi, kebutuhan peralatan modern termasuk alat fermentasi, keterbatasan penyuluh dengan kompetensi kakao, produktivitas dan daya saing rendah serta rentan hama dan penyakit) dan isu ketiga adalah **Pasar dan Rantai Nilai** (biaya transportasi tinggi, kelembagaan rantai nilai rendah, tidak ada jaminan pasar dan pelacakan serta kurangnya transparansi rantai pasok).

- Pada tahun 2021, sebesar 526.523,9 ha (71%) area Luwu Utara masih berupa hutan. Luas lahan dengan komoditas produktif sekitar 152.080,6 ha (21%). Pada periode 2016-2021, tekanan deforestasi dan degradasi hutan terlihat lebih besar pada Kecamatan Rongkong, Seko dan Rampi. Peta jalan kakao lestari bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan kakao berkelanjutan sebagai respon atas berbagai permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan kakao di Kab. Luwu Utara.
- Terdapat lima strategi dalam peta jalan kakao lestari di Kabupaten Luwu Utara:
  - a. Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan (4 intervensi, 15 indikator)
  - b. Peningkatan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan (11 intervensi, 48 indikator)
  - c. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk kakao (4 intervensi, 28 indikator)
  - d. Perbaikan rantai pasok yang berkelanjutan (3 intervensi, 14 indikator)
  - e. Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan (5 intervensi, 17 indikator)
- Untuk dapat mengimplementasikan peta jalan, dibutuhkan berbagai sumber pendanaan seperti dari pemerintah, swasta, komunitas, maupun masyarakat, terutama sumber pendanaan inovatif. Kebutuhan biaya setiap aktivitas dalam peta jalan kakao lestari dikalkulasikan dengan mengacu pada standar biaya maksimum pemerintah. Simulasi pembiayaan peta jalan dilakukan dengan mengacu pada standar biaya. Strategi dengan kebutuhan biaya terbesar adalah strategi 2 untuk meningkatkan akses modal penghidupan petani kakao.
- Langkah ke depan implementasi peta jalan di Luwu Utara membutuhkan kolaborasi semua pihak (pentahelix).

(Penyerahan cenderamata kepada Bupati Luwu Utara oleh Dr. Sonya Dewi)

## Laporan Tahun Kedua Proyek Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes

**Dr. Betha Lusiana, SFITAL-ICRAF**

- Program SFITAL ada di Filipina (di Mindanao) dan Indonesia (kelapa sawit dan kakao di Luwu Utara). Sasaran serta fokus dari SFITAL adalah kebun kakao dan sawit mandiri yang maju dan mampu mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan dengan mempertahankan penyediaan jasa lingkungan/ekosistem. Selain itu, memahami prinsip-prinsip kewirausahaan sehingga mampu terlibat, dan bersaing di pasar global dalam kemitraan yang setara dengan pemerintah dan swasta. Ini membutuhkan kemitraan yang erat dengan pemerintah nasional dan daerah, pihak swasta/pengusaha dan industri, pihak pekebun dan pihak UMKM.
- Ditingkat nasional, menyusun kajian-kajian dan diskusi-diskusi yang melibatkan pemerintah nasional, propinsi serta pelaku usaha agar standar berkelanjutan kakao ini dapat diterapkan oleh pekebun. Hasil dari kajian berbagai standar dan indikator

tadi dimasukkan menjadi bagian dari peta jalan termasuk indikator pendekatan yuridiksi dalam mengelola komoditas berkelanjutan. Ditingkat tapak/kebun, SFITAL sudah menyusun peta tipologi kawasan kakao yang digunakan untuk menyusun strategi intervensi yang tepat untuk masing-masing tipologi yang ada.

- Di SFITAL, secara keseluruhan ada 5 tipologi namun karena bekerja di daerah yang produktivitasnya sedang atau tinggi, jadi belum fokus ke yang rendah sehingga bekerja di 3 kawasan.
- Untuk peningkatan kapasitas, sudah memberikan pelatihan kepada kurang lebih 1.200 petani yang dipilih dari masing-masing kelompok tani yang terlibat dan bekerja sama dengan penyuluh kabupaten dalam melakukan pendampingan yang cukup intensif.
- SFITAL melihat, agro forestri kakao bisa menjadi solusi yang tepat permasalahan kakao serta tetap memberikan alternatif penghidupan bagi petani kakao dengan berbagai komoditas yang juga dihasilkan di kebun kakao petani. SFITAL bermitra dengan MARS, Rainforest Alliance dan pemerintah kabupaten menyusun Kebun Belajar Agro Forestri Kakao dimana sudah ada 6 dari 9 target yang telah didesain dan siap melakukan pelatihan bersama petani. Ditargetkan 3 di setiap kawasan topologi kakao untuk menjadi tempat belajar bersama.
- Untuk memberikan pemahaman kepada petani dan pihak yang terlibat mengenai kondisi jasa lingkungan di Kab. Luwu dengan melakukan pengukuran jasa ekosistem khususnya untuk regulasi tata air dan karbon ditingkat tapak. Ini diukur untuk menjadi data secara spesifik di kabupaten Luwu Utara agar menjadi dasar bagi program kegiatan, skema pembayaran maupun insentif jasa lingkungan untuk mendukung kakao berkelanjutan.

### **Pemaparan Kunci : Food Estate untuk Sektor Kakao Berkelanjutan Indonesia dan Subsidi Pupuk Khusus Kakao**

**Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, MT**, *Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*

- Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya ketahanan pangan secara nasional sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas. Salah satu program yang saat ini terus diupayakan untuk bisa diwujudkan dengan baik adalah program Food Estate. Ini dikembangkan untuk menanggapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan nasional melalui proyek-proyek strategis nasional yang tersebar di beberapa propinsi dan kabupaten.
- Food Estate dikembangkan secara terintegrasi mulai dari berbagai komoditas baik pertanian, perkebunan, bahkan diintegrasikan dengan program peternakan didalam satu kawasan. Dengan pengertian, program ini tidak semata-mata mengutamakan tanaman pangan tetapi dibuka seluas-luasnya untuk tanaman perkebunan lainnya termasuk kakao.
- Saat ini diupayakan untuk dikembangkan di Kalimantan Tengah seluas 180.000 ha dengan menyesuaikan tata ruang dan feasibility serta kesesuaian lahan yang ada. Program yang sama dilakukan di propinsi lainnya. Komoditasnya juga tidak dibatasi. Harapan pengembangan Food Estate ini, selain untuk meningkatkan cadangan pangan nasional juga mewujudkan peningkatan nilai tambah produk-produk dari sektor pertanian serta diharapkan menjadi produk-produk lokal dimana petani bukan mampu mengembangkan usaha tani dalam skala yang lebih luas. Kemudian,

diharapkan terbuka potensi ekspor komoditas pertanian di Indonesia ke berbagai negara dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

- Dalam pelaksanaannya, diharapkan terwujud integrasi disistem, baik produksi, pengolahan hingga pasar dan target konsumen yang diharapkan. Merujuk pada upaya-upaya pemerintah dalam Food Estate ini, diharapkan pemerintah propinsi dan daerah juga membuka kesempatan yang seluasnya untuk mengajukan penggunaan pemanfaatan area kawasan food estate ini untuk perkebunan kakao karena masih kekurangan bahan baku. Industri sudah terbangun secara signifikan tetapi saat ini mengalami permasalahan dalam pemenuhan bahan bakunya. Diharapkan dari pemerintah propinsi, daerah, sektor swasta lainnya agar bisa membangun kemitraan mulai dari hulu sampai hilir agar kakao bisa menjadi salah satu komoditi andalan di Food Estate.
- Berkat kerja sama yang baik seluruh pihak disektor kakao, pemerintah sudah memberikan fasilitas dimana kakao menjadi salah satu komoditas dari 9 komoditas yang dapat memperoleh pupuk yang bersubsidi serta tersedianya alokasi yang direncanakan di tahun 2023. Sulawesi akan mendapatkan alokasi terbesar di tahun 2023 ini. Fasilitas ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan dipertanggung jawabkan karena alokasi sebesar 211.000 ini tidak mudah untuk direalisasikan diseluruh wilayah. Oleh karena itu, mari bekerja sama agar petani yang memang perlu menggunakan pupuk ini dapat mengaksesnya secara baik. Diharapkan CSP dapat menjadi motor penggerak untuk mendiskusikan, memfasilitasi dan mendiskusikan upaya-upaya yang dilakukan agar alokasi pupuk bersubsidi bisa terealisasi sampai dengan 100%.

## Pemaparan 1

**Puspita Suryaningtyas, MBA**, mewakili *Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas*

### ***“Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Indonesia”***

- Ditengah permasalahan perkebunan komoditas kakao saat ini, masih ada semangat menyala dari para pihak terutama yang hadir saat ini untuk terus mengupayakan perbaikan pengembangan kualitas perkebunan.
- Merujuk pada hasil pemetaan masalah pengembangan kawasan perkebunan, dapat diketahui bahwa sebagian besar produktivitas perkebunan masih dibawah optimal. Terkait dengan komoditas kakao dan kelapa sawit yang saat ini menjadi fokus kerja kegiatan SFITAL, beberapa permasalahan yang masih dihadapi utamanya terkait dengan perkebunan rakyat, antara lain adalah status lahan yang masih tumpah tindih dengan kawasan hutan, penguasaan lahan yang kecil, pengelolaan kebun yang tidak seragam dan peremajaan yang dilakukan dengan tidak baik.
- Pembangunan perkebunan berkelanjutan merujuk pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18/2020) dimana arah kebijakan pangan dan pertanian yaitu meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan disisi lain diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Dilingkup global dan nasional, telah banyak inisiatif yang menysasar isu-isu keberlanjutan. Dengan mempertimbangan isu strategis yang telah ada, pemerintah juga mengangkat keberlanjutan sebagai salah satu arah kebijakan nasional melalui pengembangan sistem pangan berkelanjutan, pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya berkelanjutan, agro forestry, dsb.

- Merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia kepada dunia untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kedepannya, subsektor perkebunan diarahkan untuk menuju pada pembangunan perkebunan berkelanjutan. Dua arah kebijakan pengembangan perkebunan adalah mendorong pertumbuhan ekspor non-migas dan pertumbuhan PDB perkebunan, ekspor hasil pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perkebunan. Untuk mencapainya, beberapa arah pengembangan kepada peningkatan produktivitas, pengembangan dan penguatan berbenihan, penguatan hilirisasi dan nilai tambah perkebunan, dll.
- Prinsip pengembangan perkebunan berkelanjutan yang dimulai dari seluruh subsektornya dimana unsur-unsur produktivitas, transparansi, traceability, sosial dan lingkungan dapat diterapkan.
- Yurisdiksi berkelanjutan memang merupakan hal baru, oleh karena itu diupayakan untuk berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak untuk dapat mengoptimalkan kebijakan tersebut. Salah satu wujud kolaborasi dengan mitra pembangunan dengan Uni Eropa yaitu Studi “Terpercaya”. Hasil yang diharapkan dari Studi Terpercaya ini antara lain adalah terukurnya kinerja dan kredibilitas suatu wilayah yurisdiksi dalam upaya untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya adalah meningkatnya prestasi untuk komoditas berkelanjutan pada tingkat yurisdiksi dan juga meningkatnya keberterimaan pasar atas komoditas berkelanjutan dari suatu wilayah yurisdiksi.
- Detail indikator dalam Studi Terpercaya yang digunakan untuk mengukur kinerja berkelanjutan dari suatu wilayah yurisdiksi dimana terdapat 23 indikator yang dikelompokkan dalam 4 pilar yang coba disejajarkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mulai dari Pilar Lingkungan Hidup, Pilar Sosial, Pilar Tata Kelola, dan Pilar Ekonomi.

**Ir. Hendratmojo Bagus H., M.Sc.,** *Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.*

#### ***“Kolaborasi Multi Pihak untuk Peningkatan Produktivitas Kakao Nasional”***

- Pada tahun 2021, ada kecenderungan menurun untuk area dan naik turun cenderung stabil di 700.000 untuk produktivitas. Apa yang bisa secara bersama-sama dilakukan untuk mengatasi ini? Dengan berkembangnya hilirisasi, meningkatnya ekspor produk olahan bila tidak diimbangi dengan suplai bahan baku maka kita akan menjadi tempat wara wiri benih dari luar. Sementara disatu sisi, sumberdaya kita cukup berlimpah dan semua wilayah bisa ditanami kakao.
- Kolaborasi multipihak yang saling bersinergi dan harmonis diperlukan. Sentra-sentra kakao masih disekitar Sulawesi dan Sumatera. Kondisi pertanaman kakao nasional dimana produktivitas rata-rata nasional dibawah potensi, kualitas produksi masih rendah dimana masih lebih banyak biji kakao non fermentasi serta kelembagaan petani yang juga lemah. Pendanaan ini juga harus menjadi perhatian dan bukan hanya mengandalkan dari satu sumber, tetapi ada misalnya dari KUR, investasi, dll.
- Kita tidak bisa mengandalkan hanya diaspek hilir saja, hulu pun didorong untuk tertarik supayapertumbuhan industri di hilir menarik pertumbuhan di hulu. Indonesia sudah termasuk kategori 3 pengolah terbesar di dunia tetapi jangan sampai pengolahan ini mendapatkan bahan bakunya dari luar.
- Berbicara dari aspek perbaikan mutu, sudah ada GAP dan GMP, oleh karena itu apa yang diperlukan oleh industri, perbaikan ditingkat kebun, harus dikolaborasikan. Kemitraan usaha merupakan suatu hal yang menjadi faktor kunci bagaimana

menarik hulu dengan gerbongnya atau lokomotifnya di hilir. Peran multipihak dari hilir memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka mendorong pertumbuhan di hulunya.

- Pengawasan juga merupakan faktor kunci, karena tentunya tidak ingin produksi ada cemaran atau keluhan dari negara lain. Ini harus menjadi perhatian kita bersama juga. Dukungan pasca panen dan infrastruktur juga penting karena agar kebiasaan lama seperti menjemur di tanah, atau menjual sekedar asal bisa diperbaiki ditingkat petani. Faktor kunci lain adalah sosialisasi bagaimana petani dan kelembagaannya melakukan penguatan ditingkat lapangan. Perbaikan kebun, pemeliharaan kebun kemudian penanganan pasca panen adalah faktor kunci bagaimana mewujudkan keberlanjutan.
- Ada isu baru mengenai deforestasi yang sama-sama menjadi tantangan. Ekologi/ekosistem tanaman perkebunan yang dianggap sebagai bagian dari deforestasi bisa menjadi bahan diskusi juga bahwa di aspek mana kita melakukan deforestasi. Jika dilihat, lahan yang kosong justru ditanami tanaman yang dapat melindungi ekosistem dan ini adalah upaya bagaimana penanaman ini merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. Mudah-mudahan isu ini dan isu negative lainnya tidak menjadi faktor yang memberatkan dalam upaya menaikkan produktivitas.
- Untuk mewujudkan kolaborasi multi pihak ini diperlukan komitmen. Kolaborasi multi pihak dalam pengembangan komoditas perkebunan dari sektor hulu dan hilir perlu diperkuat dan ditingkat karena sama-sama saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling bekerja sama dan kolaborasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Didorong pula integrasi tanaman kakao dengan tanaman lain agar petani masih tetap ada penghasilan bila harga turun.
- CSP diharapkan menjadi fasilitator untuk membangun kemitraan untuk keberlanjutan kakao.

**Dr. Beria Leimona, SFITAL - ICRAF**

***“Lanskap Kakao Berkelanjutan melalui Pendekatan Yurisdiksi dan Ko-Investasi Multipihak”***

- Program SFITAL mencoba menghubungkan antara dinamika Internasional dan dinamika yang terjadi ditingkat nasional sehingga dapat dilaksanakan ditingkat kabupaten. SFITAL memfasilitasi pemerintah kabupaten Luwu Utara mengujicobakan Peta Jalan Kakao Lestari ditingkat bentang alam/lanskap.
- Ada beberapa prinsip dan konsep yang diusung antara lain adalah prinsip pendekatan yurisdiksi dan lanskap berkelanjutan serta Peta Jalan Kakao Lestari sebagai alat bantu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- Kolaborasi multipihak perlu ditekankan terutama dalam pendekatan yurisdiksi berkelanjutan. Pendekatan ini bisa menjadi transisi dimana pemerintah daerah yang tadinya menjadi sebagai *Business as Usual*, mulai mengadopsi prinsip-prinsip yang berkelanjutan.
- Pendekatan Yurisdiksi berbasis kakao memiliki beberapa rujukan ditingkat nasional, salah satunya adalah merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024.
- SFITAL tidak akan mengeluarkan standar baru atau menjadi lembaga sertifikasi. SFITAL mereview standar-standar yang sudah ada baik ditingkat komoditas maupun ditingkat lanskap. Standar ini dibandingkan dan dilihat persamaan dan perbedaannya. Ada dari Terpercaya, LandScale, SourceUp, KDSD, ParCiMon dan GGP.



- Strategi Kakao Lestari yaitu alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan, meningkatkan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan, meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk kakao, memperbaiki rantai pasok yang berkelanjutan, dan insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan.
- Bekerja sama dengan Diskominfo, semua indikator yang dihasilkan oleh Peta Jalan Kakao Lestari semua berupa sistem digital yang kemudian dikelola oleh Pemda saat program Peta Jalan berakhir.
- SFITAL telah melakukan uji coba ditingkat lapang, mulai dari pelatihan terutama pelatihan kakao agroforestri, bagaimana melakukan demonstration plot yang berfokus pada agroforestri kakao, serta bagaimana melakukan akses modal terutama jika petani ingin mengembangkan agroforestri kakao yang berbasis madu dan produksi aren. Bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, SFITAL melakukan pemantauan dan pengukuran jasa ekosistem.
- Pesan kunci dan simpulan adalah Peta Jalan Kakao Lestari sebagai alat bantu berbagai pihak di Kabupaten untuk menghubungkan antara tuntutan global (dan nasional) dan pelaksanaan ditingkat yurisdiksi dalam mewujudkan kakao berkelanjutan, Data dan Analisis yang dihasilkan SFITAL menjadi baseline bagi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari, serta Model bisnis ditingkat petani merupakan uji coba penerapan Peta Jalan yang dapat menyediakan praktik baik pelaksanaan yang lebih luas dan terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra OPD.

## Laporan Kuartir Kedua Kantor Eksekutif CSP

### Wahyu Wibowo, *Eksekutif Direktur CSP*

- Ada anggota baru di CSP yaitu Bedoukian yang berkantor di Connecticut dan sudah 2 bulan bergabung, sebuah perusahaan insect pheromone, dan saat ini juga hadir.
- CSP dalam laporan keuangannya selalu diaudit oleh RSM dan akan berjalan dibulan depan lagi. Saat ini masih on-track dan sampai tahun ini tidak mengalami defisit dan semoga tahun depan juga tidak deficit.
- Alokasi pupuk khusus kakao bersubsidi didapat pada tahun 2022 sebesar 7,309 ton untuk Sulawesi (4 propinsi). Lalu diusulkan realokasi dari luar Sulawesi dan disetujui sehingga alokasi di Sulawesi (4 propinsi) menjadi sebesar 12,469 ton (per 8 September 2022). CSP akan melakukan akselerasi serapan Oktober-Desember 2022 di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dimana di Sulsel ada tambahan 3000 ton.
- Sebelum ada realokasi, sudah 100% serapan, tetapi karena ada tambahan realokasi maka jadi turun lagi serapannya. Ini menjadi PR bersama sehingga yang Sulsel bisa menyusul untuk bisa memenuhi serapan secara nasional.
- Ada beberapa agenda di CSP yang sedang dikerjakan dan didukung oleh anggota CSP dalam melakukan penyesuaian dengan anggota lainnya untuk membahas isu seputar pupuk, benih, akses ke pembiayaan, serta bagaimana pendekatan lanskap bisa dibawa bersama-sama. Dan terakhir, akan membahas Peta Jalan untuk disepakati baik oleh Asosiasi Kakao dan didukung oleh Kementerian Pertanian, Bappenas, dsb. Ini menjadi mandat CSP untuk memfasilitasi supaya peningkatan produktivitas yang menjadi fokus utama saat ini bisa dilakukan dan ketergantungan terhadap impor menurun dan pendapatan petani menjadi lebih baik.

## Segmen 1 Diskusi Panel

**dr. Edyman W. Ferial, PhD, Moderator**

Pertanyaan untuk panelis : “ Seperti apa kebijakan kakao berkelanjutan ditingkat nasional yang diimplementasikan pada tingkat daerah?”

**Bpk. Mangantar David, Sub Koordinator Tanaman Tahunan dan Penyegar, Kementerian Pertanian**

- Acara hari ini adalah bagian dari kolaborasi antar sektor baik dari industri, pemerintah dan LSM terkait kakao. Kementerian sangat mendukung untuk kembalinya kejayaan kakao Indonesia. Dahulu sudah ada program Gernas Kakao (2009-2013) dengan dana saat itu kurang lebih 3 trilyun. Tetapi, 3 trilyun tersebut hanya bisa memenuhi atau memperbaiki kurang lebih 20,6 %, artinya 70 sekian % belum tersentuh. Tahun 2014 hingga sekarang, sudah dilakukan beberapa pembinaan dan sudah mulai terlihat adanya sedikit peningkatan produksi dan produktivitas. Yang perlu diselesaikan adalah adanya satu data nasional terkait kakao dan bagaimana caranya produksi dan produktivitas tetap bisa ditingkatkan. Petani kakao itu tidak susah, begitu tahu harga bagus dan terjamin maka seluruh program yang dilakukan oleh seluruh pihak akan berjalan dengan baik. Kalau harga masih naik turun, akan susah meskipun mengikuti harga pasar dunia tetapi semestinya karena bahan baku di Indonesia harus bisa dijaga kestabilan harga dengan kolaborasi multipihak. Juga telah mengembangkan dan memenuhi di hulu dengan target produksi unggul bersertifikat.

**Ibu Dr. Murniati, MT., Analis Perencana Perekonomian BAPELITBANGDA SULSEL**

- Mendukung implementasi kebijakan kakao berkelanjutan tingkat nasional ke tingkat kabupaten/daerah ini karena sejalan dengan visi misi Propinsi Sulsel yang dituangkan dalam RMPJD. Dilihat dari tujuan dan sasaran pembangunan yaitu meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan. Ada komitmen untuk menurunkan efek rumah kaca. Yang dilakukan Pemprov untuk mendukung SFITAL adalah melalui dua kunci utama yaitu kolaborasi dan berkelanjutan melalui pola strategi kolaborasi dan keberlanjutan dengan skema ekstensifikasi, intensifikasi dan SDM.

**Ibu Nurul Fitriani, Kepala Seksi Tanaman Tahunan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop Sulsel.**

- Sejak tahun 2020 hingga sekarang pemerintah propinsi telah mengalokasikan kurang lebih 9.500 ha untuk pengadaan bibit. Dari data statistic dipropinsi Sulsel ada sekitar 36.000 ha area tanaman kakao rusak. Ada 2 kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk menangani hal tersebut yaitu ekstensifikasi dan pengadaan bibit. Yang dilakukan ini bersentuhan langsung dengan petani yang ada di kawasan pengembangan kakao di Sulsel, salah satunya adalah Luwu Utara yang telah dibantu sekitar 3 juta batang kakao yang bersertifikat. Sangat mendukung kolaborasi dengan mengandalkan dua sumber anggaran yaitu dari pusat dan dari kami sendiri.
- Yang menjadi kritikan adalah banyaknya NGO yang masuk terkait kakao ini tetapi tidak ada informasi yang masuk terkait aktifitas NGO mulai dari perencanaan awal, saat berlangsung dan laporan akhir. Sementara ini menjadi ranah tanggung jawab kami untuk mendorong kesejahteraan petani kakao.

**Ir. Alaudin Sukri, M.Si, Kepala Bappeda Luwu Utara**

- Terkait kakao berkelanjutan, seperti yang disampaikan ibu Bupati Luwu Utara ini memerlukan kolaborasi multipihak dan masing-masing harus tahu peran dan tugasnya agar bisa secara maksimal melakukan upaya peningkatan disegala bidang terkait kakao yang berkelanjutan.

**Segmen 2 Diskusi Panel**

**dr. Edyman W. Ferial, PhD, Moderator**

Pertanyaan untuk Panelis : “Bagaimana Peta Jalan Kakao Berkelanjutan bisa mengakomodasi harapan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat?”

**Fajar Niong, MARS**

- Penyusunan Peta Jalan ini disusun oleh para professional. Peta Jalan ini perlu mempertimbangkan dan diintegrasikan dengan kebutuhan untuk sawah, untuk sawit dll. MARS memiliki prinsip dalam menjalankan operasi kegiatan terutama memastikan semua yang terlibat akan saling menguntungkan. Selanjutnya, komitmen dan tanggung jawab yang kuat.

**Peni Agustijanto, Rikolto**

- Dari perspektif Rikolto, ada banyak kemajuan dalam penyusunan Peta Jalan Kakao ini dan lebih terstruktur sehingga akan lebih baik untuk diimplementasikan karena adanya pendekatan yurisdiksi tersebut. Menggarisbawahi yang dikatakan ibu Beria, tergantung model bisnis apa yang akan diimplementasikan oleh para pihak dimana area intervensi itu dijalankan. Rikolto tidak hanya bekerja disatu sektor, tetapi ada kopi dan komoditas lainnya, tetapi dikakao ini kami cukup optimistik karena para pelaku pasar global terlibat langsung dalam rantai suplainya. Ini yang menjadikan Rikolto optimis Peta Jalan ini bisa diimplementasikan dengan baik.

**Dr. Rijal Idrus, Akademisi UNHAS**

- Kakao sebuah komoditas yang spesial, tidak banyak komoditas atau perkebunan yang mendapatkan perhatian sebesar kakao. Tetapi dalam sepuluh tahun terakhir, produksi dan produktivitas kakao nasional semakin menurun. Jadi, perlu pendekatan yang baru. Peta Jalan yang dihasilkan SFITAL di Luwu Utara menggambarkan pendekatan yang cukup komprehensif dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada. Petani sendiri terkadang masih sulit untuk menerima teknologi dan Peta Jalan ini membahas persoalan ini melalui pendekatan yurisdiksi dan pendekatan lanskap agroforestri. Ini merupakan pendekatan yang sejalan dengan pendekatan ekologis dan sangat membantu capaian pengurangan gas emisi. Perlunya demplot-demplot. Pembelajaran yang sudah bagus dimasa lalu dilanjutkan dan perbaikan-perbaikan dengan pendekatan baru mendukung keberhasilan program.

**Edi Suyitno, Petani Binaan CSP**

- Kami dilibatkan dalam program untuk menjaga dan melestarikan tanaman kakao. Sebagai petani sekaligus Ketua Kelompok Tani di Kec. Sabbang, dimana ada 25 anggota petani dimana memiliki minimal 1 ha kebun kakao. Apa yang terlihat dan tergambarkan di Luwu Utara, kakao adalah tanaman primadona. Ada beberapa hal yang dilakukan bersama SFITAL dan Pemda Luwu Utara. Kami memiliki kebun

campur atas arahan SFITAL. Meskipun kakao mendapat masalah hama, tetapi kami bersama-sama mencari tahu solusinya. Dengan adanya program kakao berkelanjutan, sebagai petani sangat mengapresiasi. Nilai tambah yang perlu diperhatikan adalah nilai jualnya.

**Muhammad Aris, Petani Binaan CSP**

- Di kabupaten Soppeng, beberapa petani kakao beralih ke tanaman jagung kemudian sekarang akan beralih lagi ke kakao. Secara pribadi, tetap dikomoditi kakao, dan apa yang dipelajari bersama perusahaan kakao memberi manfaat dalam hasil. Yang menjadi kendala saat ini adalah hama dan penyakit.

**Tanya-Jawab:**

**Tanya : Yusak, Askindo**

- Untuk Ditjenbun, dalam beberapa tahun terakhir, produksi kakao menurun dan saat ini telah terjadi sejak 2010 dan ketika terjadi kolaborasi dengan beberapa pihak seperti CSP sehingga produksi bisa sedikit meningkat. Kegiatan dari Ditjenbun tidak seperti dulu. Dulu ada Gernas Kakao, tetapi saat ini tidak dilanjutkan. Apa kendalanya dan apa yang kiranya bisa dilakukan untuk bisa seperti dulu lagi?
- Kepada Bappeda Luwu Utara, ada persiapan lahan 5,000 hektar, dengan adanya 2 bendungan di Lutra yaitu di Rongkong dan Sabbang, potensi kehilangan lahan kakao berapa persen. Lahan yang dimaksud pengganti itu di daerah mana dan apa yang menjadi jaminan itu menjadi lahan yang bisa digunakan rakyat, apa jaminan legalnya?

**Jawab : Mangantar David, Kementerian Pertanian**

- Memang benar agak berkurang perhatian pemerintah untuk sektor kakao terutama sektor pendanaan karena memang kementerian terbatas sumber dayanya. Tetapi pengurangan lahan kakao juga menjadi perhatian penting, kenapa bisa berkurang. Kami berharap, anggota CSP bisa mendukung dan kegiatan-kegiatannya menutupi kekurangan kementerian terutama membantu petani-petani yang belum sempat dibantu. Untuk Gernas Kakao, sudah 3 kali diusulkan dan sepertinya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) agar bisa terlaksana kembali untuk mengembalikan kejayaan kakao.

**Jawab : Ir. Alaudin Sukri, BAPPEDA Luwu Utara**

- Terkait persiapan lahan 5,000 yang disertifikasi oleh pemerintah daerah, sudah ada sekitar 400 yang tersertifikasi.
- Terkait lahan pengganti, ada 2 program terkait intensifikasi dan ekstensifikasi. Bila 2 bendungan ini berfungsi efektif, maka kurang lebih 50.000 ha akan terairi, ini bisa menjadi pola ekstensifikasi yang diprioritaskan dalam mengedepankan kualitas.

**Jawab : Rusdi Rasyid, Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara**

- *Roadmap* ini merupakan petunjuk bagi pemangku kepentingan untuk berbicara mengenai kakao berkelanjutan sehingga siapapun pejabat di pemerintahan tetap bisa mengikuti. Salah satu komoditas yang paling familiar di Luwu Utara adalah kakao yang bisa ditemukan disemua sudut di Luwu Utara, stabil pula untuk harga dan nilainya. Berdasarkan pengalaman di Luwu Utara, kakao dibandingkan komoditi

lain, saat sudah mencapai puncak dan sempat menurun, tetap bisa bangkit kembali sehingga kami percaya kakao bisa berjaya kembali.

**Tanya :** *Subekti, Yayasan Kalimajari*

- Apakah perhutanan sosial sudah tercakup dalam Peta Jalan dan terimplementasikan? Karena isu ini dianggap deforestasi. Ini harus sama-sama dijaga karena bisa menjadi kebijakan pemerintah.

**Tanya :** *Ismet, GIZ Sulawesi Tengah*

- Berbicara mengenai kakao berkelanjutan, maka kita berbicara mengenai kebun yang sehat. Bagaimana mendapatkan bibit yang tersertifikasi. Perlu meninjau Permentan sehingga kita bisa fasilitasi petani secara mandiri dan tidak melanggar aturan.

**Jawab :** *Edi Suyitno, Petani Kakao CSP*

- Tidak ada tanaman kakao dalam hutan lindung. Sebagai petani, paham akan situasi bila terjadi bencana alam maka potensi hilangnya lahan kakao terjadi. Kabupaten Luwu Utara, hutannya masih steril dan hutan lindungnya masih belum terjangkau. Hutan yang dibebaskan oleh pemerintah pusat masih jauh jaraknya untuk dicapai. Lahan yang ada saja masih belum semua bisa dikerjakan.
- Untuk bibit tersertifikasi, sebenarnya bukan masalah bagi petani. Yang nyata kami harapkan adalah pemakaian kakao lokal karena sejak tahun 1980an sudah menanam kakao dengan bibit lokal. Bibit tersertifikasi ini juga sudah ditanam.

(penyerahan cenderamata kepada para panelis)

## Penutup

**Wahyu Wibowo, Eksekutif Direktur CSP**

- Beberapa catatan penting, *sharing* dan masukan dari Bapak/Ibu sekalian akan kami gunakan dalam perbaikan kedepannya agar kakao dapat lebih meningkat hasilnya dan memberikan banyak manfaat.

**Suyanto, ICRAF**

- Terima kasih kepada para narasumber, para panelis yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terkait peta jalan kakao berkelanjutan.

Presentasi pemaparan narasumber dapat diunduh pada link berikut ini:

<https://agroforestri.id/ppt-semnaskakao>

### Photo Kegiatan

